

BAB III

BIOGRAFI TOKOH

A. Kehidupan Zakiah Daradjat

Zakiah Dradjat lahir pada tanggal 6 November 1929 di kampung Kotamerapak, Kecamatan Ampek Angkek, Kotamadya Bukittinggi. Beliau dilahirkan oleh pasangan H. Daradjat Husain dan Rafi'ah yang memiliki enam orang anak, salah satunya Zakiah Dradjat sebagai anak pertama dari keenam bersaudara. H. Dradjat Husain memiliki istri kedua yang bernama Hj. Rasunah dengan lima orang anak. Meskipun demikian, Zakiah Dradjat tidak kekurangan perhatian dari ibu tirinya, sama sebesar kasih dari ibu kandungnya.

Kedua orang tua Zakiah tercatat mengikuti organisasi yang didirikan pada akhir penjajahan Belanda, yakni **organisasi Muhammadiyah** yang diikuti oleh H. Daradjat dan **Sarikat Islam** yang diikuti oleh Rafi'ah. Kedua organisasi ini merupakan organisasi yang memiliki komitmen dan peran dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta mengatasi masalah sosial keagamaan dan menangani pengelolaan pendidikan pada masa itu.

Pola pikir komunitas Muhammadiyah tercermin dari pemikiran K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri komunitas yang prihatin terhadap kondisi objektif umat Muslim Indonesia yang mana pengalaman ritual keagamaannya tercampur dengan Takhayul, Bid'ah dan Khurafat sebagai produk Islam-Tradisionalis atau bisa dikatakan Islam-Nusantara. Pusat perhatian Muhammadiyah lebih terfokus pada bidang sosial keagamaan, bidang dakwah, dan pendidikan yang dibuktikan dengan *an intelligent choice* (pilihan cerdas). Bisa dilihat dari hubungan sosial K.H.

Ahmad Dahlan yang luas dan saling berkomunikasi dengan organisasi lain seperti Boedi Oetomo (BO), Sarekat Islam (SI) dan Jami'at al-Khairat¹. Hal ini yang memungkinkan H. Daradjat bertemu dengan Hj. Rafiah sebagai anggota organisasi Sarekat Islam (SI).

Organisasi Sarekat Islam itu sendiri awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhoedi pada tahun 1905 sebagai organisasi yang memiliki dasar Islam dan ekonomi dengan dukungan Djokrominato. Karena kerjasama ini, pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam (SDI) berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI)². Sarekat Islam ini juga mengambil konsep sosialisme dalam Islam yakni “umat itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan)” bermakna bahwa semua orang itu sama, walaupun memiliki perbedaan pendapat.³

Di akhir hidup beliau, Zakiah Dradjat sempat mengalami kritis juga perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakarta Selatan hingga meninggal dunia pada hari Selasa, 15 Januari 2013 di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁴

B. Latar Belakang Pendidikan dan Karir Zakiah Daradjat

Dikarenakan lahir dari orang tua yang menjadi seorang aktivis, membuat Zakiah Dradjat mengemban pendidikan yang bermutu pula, dengan uraian sebagai berikut:

¹Imam Ghozal, Pola Kepemimpinan Organisasi Muhammadiyah, *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Volume 05, Nomor 01, ISSN: 2620-6692, 2022, h. 74

²Muh. Taqwin Tahir, Achmad Musyahid, Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Dan Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor 2, 2021, h. 311

³Muh. Taqwin Tahir, Achmad Musyahid, Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Dan Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, h. 314

⁴ Nunzairina, ‘Sejarah Pemikiran Psikologi Islam Zakiah Daradjat’, *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2.1 (2018), h. 99 <<https://doi.org/10.30829/J.V2i1.1793>>.

1. Sekolah Standars School Muhammadiyah di Bukittinggi, menjadi tempat awal Zakiah mendapatkan pengalaman intelektual, ilmu pengetahuan, sampai pada pendidikan agama dengan kelulusan tahun 1941. Selain sekolah umum, Zakiah Dradjat juga mengikuti sekolah sore khusus agama atau *Diniyyah*.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Padang Panjang, dari tahun 1944 sampai 1947⁵. Di tempat tersebut Zakiah juga aktif mengikuti Kuliyyatul Muballigat selama hampir enam tahun. Selain modal utama pengetahuan yang didapat dari kedua lembaga pendidikan tersebut, budaya Minangkabau juga memberikan pengaruh yang cukup besar dengan adanya pemberian tanggung jawab lebih besar kepada perempuan.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan memilih untuk mengikuti program paket B, yakni program pendalaman ilmu alam, di SMA B TDR (Ilmu Pengetahuan Alam) di Bukittinggi. Sampai kelulusan beliau, pada tahun 1951.
4. Pendidikan perguruan tinggi Zakiah utamanya berada di Yogyakarta. Diawali dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) fakultas Tarbiyah untuk meraih gelar Dotoral Satu (BA) selama 4 tahun sampai tahun 1956. Dengan prestasinya yang cukup besar sehingga membuka peluang beliau mendapatkan beasiswa dari DEPAG (Departemen Agama) di Kairo untuk mendalami bidang ilmu yang diminati, yakni Psikologi

⁵Damsir Dan Muhammad Yasir, Pemikiran Pendidikan Islam Zakiah Dradjat Dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* Volume 44 Nomor 02, 2020, h. 216

dengan mendaftarkan diri di Universitas Ain Syam Fakultas Tarbiyah konsentrasi *Special Diploma for Education* dan lulus pada tahun 1958.

5. Lalu melanjutkan program magistes di universitas yang sama dengan jurusan Spesialisasi Kesehatan Mental di Fakultas Tarbiyah. Program ini diselesaikan dengan cepat selama dua tahun dengan tesis beliau yang berjudul “Problematikan Remaja di Indonesia (*Musykilat al-Murahaqah fi Indonesia*).
6. Zakiah Dradjat menyelesaikan program studi tingkat tingginya pada program doktor (Ph.D) di Universitas yang sama dengan fokus studi bidang psikologi, jurusan *spesialisasi Psycho-Terapy*. Dan lulus pada tahun 1964⁶ dengan disertasi beliau yang berjudul “*Dirasah Tajribiyah li Taghayyur al-Lati Tathrau ‘ala Ayakhshiyat al-Athfal al-Musykil Infi’al fi Khilal Fithrah al-Ilaj an-Nafs Ghair al-Muwajjah an Thariq al-La’b*” yang dibimbing oleh Musthafa Fahmi dan Attia Mahmoud Hanna.
7. Dan terakhir, beliau ditetapkan sebagai direktur di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dan guru besar (Profesor) dalam bidang Ilmu Jiwa Agama di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984⁷. Hal ini dikarenakan karya tulis beliau yang banyak diminati pembaca sampai sekarang berjudul “Ilmu Jiwa Agama” terbitan tahun 1970⁸.

⁶Nunzairina, Sejarah Pemikiran Psikologi Islam Zakiah Dradjat, *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol. 2 No. 1 Tahun 2018 ISSN 2580-8311, H. 104

⁷ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005) H. 234-235

⁸ Zakiah Dradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) H. Viii

Dari latar belakang pendidikan dan kemampuan Zakiah Dradajat yang mumpuni, maka perkembangan karir beliau di lingkungan Departemen Agama mengalami perkembangan sebagaimana uraian berikut⁹:

1. Beliau mengawali karir sebagai pegawai pada perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur 1964-1967.
2. Sesuai dengan kemampuan beliau, Saifuddin Zuhri yang menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia mengangkat Zakiah Dradajat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kurikulum Perguruan Tinggi di Biro Perguruan Tinggi dan Pesantren Luhur Departemen Agama pada tahun 1967-1972.
3. Selanjutnya diangkat sebagai direktur pada Direktorat Pendidikan Agama pada tahun 1972-1977.
4. Dan diangkat lagi menjadi direktu Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam pada tahun 1977-1984.
5. Bahkan pernah menjabat sebagai anggota Dewar Pertimbangan Agung Republik Indonesia tahun 1983.

Melihat posisi beliau yang sangat strategis dalam Departemen Agama, tentu saja beliau juga memiliki andil dalam perkembangan Keputusan pendidikan di Indonesia. Hal ini beiringan dengan perkembangan pendidikan pada masa Orde baru sejak beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kurikulum

⁹ Muh Mawangir, Zakiah Dradajat Dan Pemikirannya Tentang Peran Pendidikan Islam Dalam Kesehatan Mental, . *Intizar* 21, No. 1 (1): 83-94. Accessed November 14, 2022. [Http://jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Intizar/Article/View/299](http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/299) h.85

Perguruan Tinggi, beliau ikut andil dalam pembaharuan dan pengembangan dalam bidang pendidikan masa orde baru (1972).

Kemudian ikut andil besar dengan gagasan pembaharuan beliau yang masih terasa pengaruhnya, yaitu “Surat keputusan bersama Tiga Menteri” (yaitu Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan). SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri ini dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1975 pada kongkurensi Kepres dan Inpres No. 03 Tahun 1975.

Hal ini dilatar belakangi adanya usaha untuk mengatasi kecemasan umat Islam terhadap sistem pendidikan pada masa krisis Islam pasca G.30 S PKI yang membuat agama Kristen Katolik besar-besaran mengadakan upaya kristenisasi di kalangan umat Islam. Sehingga SKB Tiga Menteri ini menjadi model solusi yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi madrasah dengan adanya tiga tingkatan Madrasah yang setara dengan sekolah umum dengan ijazah yang diakui, yaitu 1) tingkatan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar); 2) Madrasah Tsanawiyah (Sekolah Menengah Pertama); dan 3) Madrasah Aliyah (Sekolah Menengah Atas).

Sehingga kelulusannya bisa melanjutnya ke jenjang pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Seperti pada kebijakan mengenai kurikulum madrasah, jadi tahun 1978 lulusan Madrasah Aliyah di Bogor dapat diterima kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB)¹⁰. Hal ini memudahkan siswa yang lulusan Madrasah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya.

Tidak hanya itu, SKB Tiga Menteri juga memiliki makna bagi umat Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh....*, h. 237

1. Adanya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswi di Madrasah yang terbatas pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional (pesantren dan madrasah)
2. Terbukanya peluang bagi santri-santri yang lulusan pesantren untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor modern.
3. Sayangnya komposisi kurikulum di madrasah hanya 30% pelajaran agama dan 70% mata pelajaran umum.

Jadi SKB Tiga Menteri ini masih harus mengadakan perbaikan, terutama pada mutu pendidikan agar bisa menjadi lebih baik lagi.¹¹

Selain dengan pengadaan SKB tiga Menteri, Zakiah Dradjat juga mengupayakan kasus pengadaan Ujian Guru Agama (UGA). Program UGA ini merupakan program percepatan (*crass Program*) pada pengadaan guru-guru agama yang dibutuhkan oleh semua madrasah yang terdapat di Indonesia. Pada Program UGA ini terdapat masalah penyimpangan jual-beli SK pengangkatan yang dimainkan oleh mereka yang berbau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sehingga menyebabkan jatuhnya mutu pendidikan di Madrasah.¹²

C. Keadaan Sosio-Historis Zakiah Dradjat

Kelahiran Zakiah Dradjat masih termasuk pada masa penjajahan Hindia Belanda, yakni pada tahun 1926. Tetapi dilihat dari latar belakang kedua orang tua beliau yang menjadi aktivis pada organisasi Muhammadiyah (bapak beliau) dan organisasi Sarikat Islam (ibu kandung beliau), serta bimbingan penuh dari ibu

¹¹Heni Yuningsih, Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru, *JURNAL TARBIYA* Volume: 1 No: 1 – 2015, h. 184

¹²Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh.....*, h. 238

sambung (istri kedua bapak beliau). Zakiah Dradjat mendapat pendidikan yang mumpuni, baik itu dari segi agama, pengetahuan sampai intelektualnya.

1. Kondisi Sosial Politik Pendidikan Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Dilihat dari sejarah pendidikan pada masa kecil Zakiah, pada tahun 1932 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang mempersulit pendidikan Islam di Indonesia. Peraturan tersebut adalah adanya izin kepada Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*) untuk menutup dan memberantas madrasah dan sekolah yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda.¹³

Bahkan ada yang berpendapat bahwa masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam belum diajarkan di sekolah-sekolah umum, tetapi ada diajarkan di tingkat perguruan tinggi di fakultas Hukum dengan nama mata kuliah Islamologi, yakni pemahaman tentang Islam. Akan tetapi pendidikan Islam tetap diajarkan di jam-jam pelajaran waktu sore setiap hari minggu atau jum'at oleh beberapa pendidik agama Islam¹⁴. Melihat kembali pada kelas *Diniyyah* sore yang diikuti oleh Zakiah Dradjat.

Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Islam di Indonesia diberikan kebebasan baik itu dalam kebijakan organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, sampai pada pesantren. Walaupun masih dalam pengawasan pemerintah Jepang yang menjajah pada masa itu. Bahkan pada masa itu, hampir

¹³ Fatkhul Mubin, Abd Aziz, Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonial Belanda, *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, Volume 3, Nomor 01, 2020, h. 129

¹⁴ Sofyan, Eksistensi Pendidikan Dan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Pra Dan Pasca Kemerdekaan, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol. 16, No. 1, 2022, h. 348

setiap minggu pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren untuk memperkuat kedudukannya dari kedekatan Jepang dengan Kiyai setempat. Akan tetapi kemudahan ini hanya berlaku selama satu tahun.

Setelah menjajah lebih dari satu tahun, pendidikan masa penjajahan Jepang mengalami kemerosotan sesuai dengan kebijakan baru yang disebar melalui media radio yang disebut misi Nipponisasi Jepang yang nampak pada keadaan-keadaan berikut:

- a. Anjuran kepada Umat Muslim untuk melakukan Shalat menghadap Matahari.
- b. Sengaja Mandi tanpa menutup Aurat di beberapa lembaga Pendidikan Islam dan tempat umum lainnya.
- c. Banyak anak yang lahir tanpa ayah karena perlakuan orang-orang Jepang terhadap wanita-wanita di Indonesia
- d. Menerapkan sistem kerja *Romusha* (kerja sukarela/paksa) kepada warga Indonesia.
- e. Tersebarnya *Kempeitei* (polisi rahasia Jepang) yang tidak segan menyiksa dan membunuh masyarakat Indonesia yang dicurigai.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mulai mengadakan pemberontakan dari Aceh, Banjarmasin, Tasikmalaya dan wilayah Nusantara lainnya dengan cara menyatukan masyarakat dengan organisasi-organisasi Islam yang baru dibentuk pada masa Jepang seperti Hizbullah dan Majelis Syurah Muslim Indonesia dengan pernyataan “Kami bangsa Indonesia sesungguhnya didirikan atas ridha Allah. Kami

kaum Muslimin Indonesia dan beribu-ribu kekuatan bersenjata Muslim, siap mempertahankan kehormatan agama dan negeri kami.”¹⁵ Pemberontakan terus berlanjut dan Hingga pada akhirnya Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Kondisi Politik Pendidikan Pasca Kemerdekaan dan Kontribusi Zakiah Dradjat Dalam Perkembangan Pendidikan di Indonesia.

Setelah kemerdekaan pendidikan Islam dalam berbagai model dan institusinya tetap mendapat kesempatan untuk berkembang oleh Pemerintah Republik Indonesia terutama dalam keikutsertaannya dalam membina akhlak bangsa yang berkepribadian Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional ber Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kebebasan beribadah bagi para pemeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Pasal 29 UUD 1945 dibangun atas landasan adil Pancasila yang merupakan kristalisasi dari esensi kehidupan kultural bangsa menghendaki agar watak sosialistik-religius rakyatnya tetap lestari dan diperkokoh melalui pendidikan agama termasuk pendidikan Islam.

Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan Indonesia sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga ini secara inisiatif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu badan khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.

¹⁵ Aslan, Hifza, Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang Di Sambas, Indonesia, *Edukasia Islamia: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2019 h. 179

Sebagai bentuk pengakuan dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam maka dilahirkan berbagai peraturan perundangan yang mengatur pendidikan Islam itu. Pada tahun 1950 madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal. Undang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pada pasal 10 disebutkan “ Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementerian Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar”.

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di periode awal tahun 1970-an justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34 tanggal 18 April Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. Isi keputusan ini pada intinya mencakup tiga hal, yakni :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.

Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.

Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Kepres Nomor 34 Tahun 1972 ini dipertegas oleh Inpres Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan “Agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan

nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama”. Dari ketentuan ini, Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan Kepres Nomor 34 Tahun 1972 dan Inpres Nomor 15 Tahun 1974, penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Mendikbud. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diteruskannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Depdikbud.

Maka pada tahun 1975 pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang disebut SKB Tiga Menteri Nomor 6 Tahun 1975, No. 037 /U/ 1975 dan No. 36 Tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. Keputusan bersama tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No.15 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No.15 Tahun 1974, sesuai dengan petunjuk presiden pada sidang kabinet terbatas tanggal 26 November 1974. SKB ini pada akhirnya melahirkan kurikulum baru tahun 1976 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah beserta jurusan-jurusannya (Syariah, IPS, Matematika, Bahasa, dan IPA). Sedangkan kedudukan pendidikan agama di sekolah umum tingkat dasar sampai dengan universitas negeri (yang diperkuat dengan TAP MPR, no. IV/1973, no.IV/1978 dan TAP.no. II/1983 tentang GBHN) direalisasikan dengan kurikulum 1984 (untuk SMA). Disamping madrasah sebagai

sarana peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, semakin mapan dan istiqamah.

Kemudian dilanjutkan oleh SKB Dua Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 (Dikbud) ; No. 045 Tahun 1984 (Agama) tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Sekolah Madrasah yang isinya antara lain ; penyamaan mutu lulusan madrasah dan dapat melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Hal ini membuat lahirnya kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 100 Tahun 1984 untuk Madrasah Tsanawiyah, dan Nomor 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah.¹⁶

Akan tetapi keputusan ini masih memiliki kekurangan. Sebab, penguasaan ilmu pengetahuan agama dirasa kurang dalam madrasah. Padahal pada sisi materi pengetahuan umum secara kualitas maupun kuantitas madrasah terjadi peningkatan. Maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987, yaitu mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) demi mengembangkan serta mendalami ilmu agama tanpa mengenyampingkan ilmu umum sebagai upaya mengembangkan wawasan ilmu (Asrohah, 1999:199).

Selanjutnya, adanya penetapan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Berdasarkan penetapan tersebut, pendidikan nasional bukan lagi berdasar pada sekolah sebagaimana dahulu.

¹⁶Harmonedi, M. Zalnur, Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan, *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 316-318

Sehingga, Pendidikan Nasional memuat jalur sekolah dan jalur luar sekolah, serta mencakup jenis pendidikan akademik, kejuruan, profesional, dan keagamaan. Berdasarkan perihal itu, pendidikan Islam dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu majlis ta'lim dan pesantren dimasukkan ke dalam jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan madrasah dimasukkan ke dalam jalur sekolah pendidikan keagamaan sebagai SD, SMP, serta SMA yang memiliki ciri khas Islami (Hanipudin, 2019:46).

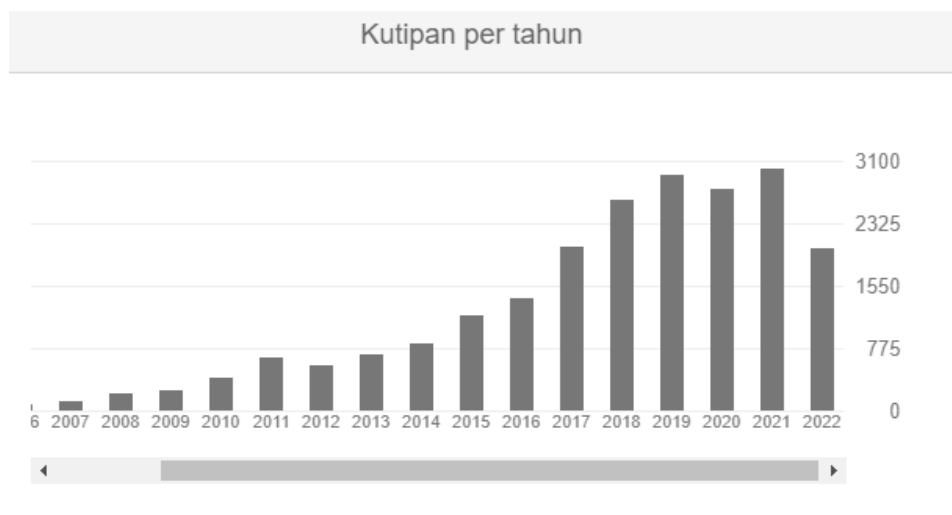
Tetapan itu menarik karena koneksi antara pendidikan Islam nonformal dengan pendidikan formalnya dipisah, madrasah berubah menjadi sekolah seperti pada umumnya, adapun dampak dari perubahan tersebut, yaitu Perguruan Tinggi Islam (PTI) menjadi terlepas dengan jenjang yang berada di bawahnya. Hal ini menyebabkan lulusan SMA atau Madrasah Aliyah (MA) tidak dapat lagi mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Islam, melainkan alumni pesantren atau alumni pendidikan Islam luar sekolah lainnyalah yang justru lebih pantas untuk masuk ke perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu agama Islam.

Lalu, berlaku kurikulum 1994 untuk menindaklanjuti UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. MAPK mengalami pergantian nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Perubahan nama tersebut adalah akibat keterlibatan dari PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Pasal 4 Ayat (3) dan SK Mendikbud Nomor 489/U/1992 yang berurutan-turut mengemukakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikelola Departemen

Agama ialah sekolah umum yang memiliki ciri khas Islami serta bahwa Madrasah Aliyah (MA) adalah Sekolah Menengah Atas dengan ciri khas Islam.¹⁷

D. Karya tulis dan Pemikiran Zakiah Dradjat

Di antara karya-karya yang pernah ia tulis adalah; *Ilmu Jiwa Agama* (1970), *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental* (1970), *Problem Remaja di Indonesia* (1974), *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak* (1982), *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (1971) *Peranan Agama dalam kesehatan Mental*, *Ilmu Pendidikan Islam* dan masih banyak karya-karya lainnya dalam bentuk terjemahan, karangan bersama, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya



Gambar 02. Indeks kutipan karya tulis Zakiah Dradjat¹⁸

Selain menulis buku, Zakiah Dradjat juga menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab, seperti buku Prinsip-prinsip dan implementasinya dalam Pendidikan I, II, dan III terjemahan dari *Ususuhuwa Tathbiqatuhu at-Tarbiyah*,

¹⁷ Meutia Rahmi Haranti, Hudaidah, Perkembangan Pendidikan Madrasah Pada Masa Orde Baru, *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 3 Nomor 3, 2021 H. 677-678

¹⁸Data Zakiah Dradjat Di Google Cendikia, Diakses 14. 11. 2022 <https://Scholar.Google.Co.Id/Citations?User=AlbwdAAAAAJ&HI=Id>

kitab Ilmu Nafsi karya Prof. Dr. Abdul Aziz el-Quussy dan buku kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat jilid I, II, III terjemah dari kitab karya Prof. Dr. Musthafa Fahmi dengan judul *ash-Shihahan Nafsiyyah fi al-Usratiwa al-Madrasatiwa al-Mujtama'i*.¹⁹

Selain karya tulis, Zakiah Dradjat juga memiliki peran penting dalam kegiatan karya ilmiah, dengan uraian sebai berikut:

- a. Tahun 1983 sebagai pendiri sekaligus ketua Yayasan Islam di Jakarta yang bernama “Ruhama”.
- b. Tahun 1990, sebagai pendiri sekaligus ketua yayasan di kota yang sama, dinamai Yayasan Kesejahteraan Mental Bina Amalah.
- c. Serta ikut berperan pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Pendidikan Islam di Madrasah.²⁰

Sedangkan karya tulisnya sendiri dalam bentuk buku, pertama kali sesuai dengan keahlian beliau, yakni buku Kesehatan Mental (1969), lalu memasukkan unsur agama dalam kesehatan mental dalam bukunya yang berjudul “Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental (1970), dan disederhanakan menjadi buku “Ilmu Jiwa Agama” (1970) yang berkaitan dengan pendidikan Islam, serta buku “Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental” di tahun yang sama.

Zakiah Dradjat juga memperhatikan tentang kenakalan remaja dalam tesis beliau yang berjudul “*The Problems of Adolescence in Indonesia*” (Problem Remaja di Indonesia), dan beberapa karya tulis lainnya yang berhubungan dengan

¹⁹Sulaiman W., Penerapan Pendidikan Islam Bagi Anak Di Usia Emas Menurut Zakiah Dradjat, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 6, Nomor 05, 2022, h. 3958

psikologi pendidikan dan psikologi agama untuk meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam di Indonesia.

1. Buku Ilmu Jiwa Agama

Buku pertama yang ditulis oleh Zakiah Daradjat adalah buku tentang Ilmu Jiwa Agama. Adapun identitas dari buku ini, sebagai berikut:

Judul Buku : Ilmu Jiwa Agama

Pengarang : Zakiah Daradjat

Penerbit : PT. Bulan Bintang

Tahun terbit : Cetakan pertama terbit tahun 1970 dan cetakan yang ditelaah sebagai objek kajian adalah cetakan yang ke-17 terbitan tahun 2005

Indeks : hlm. 199

ISBN : 979-418-050-5

Buku ini menjelaskan tentang pengetahuan berkenaan dengan Ilmu Jiwa Agama semakin hari semakin bisa dirasakan urgensinya dalam berbagai kalangan, seperti dalam dunia pendidikan, pembinaan mental dan dakwah Islamiyah. Latar belakang penulisan buku ini dikarenakan Zakiah Dradjat ditunjuk menjadi dosen “Ilmu Jiwa Agama” oleh Fakultas Ushuluddin, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sejak tahun 1967.

Sedangkan latar belakang isi pembahasan dalam buku ini diambil dari kebutuhan ilmu yang berkaitan dengan ilmu jiwa agama dari beberapa bahan literatur yang berkaitan dengan Ilmu Jiwa Agama, serta pengalaman dari pasien-pasien yang datang ke klinik jiwa tempat konsultasi dan perawatan jiwa yang ternyata berhubungan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sehingga buku ini selesai disusun pada tahun 1968 dan dikirim ke penerbit (Bulan Bintang) pada tahun

1969 dengan tujuan dapat membantu pembinaan jiwa agama untuk bertakwa kepada Allah Swt. sesuai dengan ajaran agama Islam.

Karena mengacu pada teori-teori terkait dengan Ilmu Jiwa agama dan pengalaman-pengalaman beberapa orang yang mengalami goncangan jiwa. Maka buku “Ilmu Jiwa Agama” ditujukan sebagai pengetahuan jiwa individu, termasuk peserta didik dalam dunia pendidikan agar bisa mengetahui bagaimana cara memahami, menerima, dan mengamalkan agama Islam sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan moral agama dari anak-anak hingga dewasa. Buku ini bisa menjadi acuan pengetahuan tentang kondisi jiwa/psikologi peserta didik saat memahami pendidikan Agama Islam baik itu dari pendidikan keluarga, sekolah, sampai pendidikan yang terdapat dalam masyarakat.

2. Buku Metodologi Pengajaran Agama Islam

Buku selanjutnya yang ditulis oleh Zakiah Daradjat bersama tim di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah buku tentang Metodologi Pengajaran Agama Islam. Adapun identitas dari buku ini adalah sebagai berikut:

Judul Buku : Metodologi Pengajaran Agama Islam

TIM Penyusun: Zakiah Daradjat (ketua merangkap anggota)

Drs. Usman Said (wakil merangkap anggota)

Drs. Murni Djamal (sekretaris merangkap anggota)

Drs. Malikul Adil sebagai bagian keuangan

Dr. Yahya Qahar, Drs. Rustana Ardiwinata, Drs. Muardi Chatib, Drs. A. Hamid dan A. Somad Zawawi sebagai anggota tim penyusunan buku.

Serta dua orang konsultan penyusunan, yaitu H.A. Timur Djaelani, MA. Dan Prof. Dr. Harun Nasution.

Penerbit : PT. Bumi Aksara

Tahun terbit : cetakan pertama tahun 1992

dan cetakan yang digunakan ke-3 tahun 2008

Indeks : hlm. 270

ISBN : 979-526-230-0

Zakiah Daradjat sendiri yang menjadi ketua penyusunan merangkap anggota berharap dengan adanya buku metodologi pengajaran Agama Islam bisa bermanfaat baik itu bagi mahasiswa baik itu di lin IAIN maupun di luar lingkungan IAIN, terutama dalam hal mempelajari tentang metode-metode yang tepat dalam pengajaran agama Islam.

Buku ini kembali disusun oleh tim yang sama pada penyusunan buku “Ilmu Pendidikan Islam.” Akan tetapi penulis berpendapat bahwa teori yang ada dalam buku ini ditujukan kepada Pendidik sebagai acuan metode-metode pengajaran *as teaching* pendidikan Islam, serta dilengkapi dengan kualifikasi guru pada kompetensi kurikulum dan bidang studi.

Mengingat Zakiah Dradjat ikut andil peran dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri (Mentri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan yang berpengaruh pada kurikulum Madrasah dan pembagian bidang studi/materi yang terdapat di Madrasah. Dan pada kurikulum di madrasah sekarang lebih difokuskan pada keputusan Menteri Agama (KMA) dengan perubahan-perubahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pendidikan

3. Buku Ilmu Pendidikan Islam

Buku ketiga ini masih ditulis dengan tim yang sama, tetapi cakupan bahasannya lebih luas. Yakni membahas tentang Ilmu Pendidikan Islam, dengan identitas buku sebagai berikut:

Judul Buku : Metodologi Pengajaran Agama Islam

TIM Penyusun: Zakiah Daradjat (ketua merangkap anggota)

Drs. Usman Said (wakil merangkap anggota)

Drs. Murni Djamal (sekretaris merangkap anggota)

Drs. Malikul Adil sebagai bagian keuangan

Dr. Yahya Qahar, Drs. Rustana Ardiwinata, Drs. Muardi

Chatib, Drs. A. Hamid dan A. Somad Zawawi sebagai

anggota tim penyusunan buku.

Serta dua orang konsultan penyusunan, yaitu H.A. Timur

Djaelani, MA. Dan Prof. Dr. Harun Nasution.

Penerbit : PT. Bumi Aksara

Tahun terbit : cetakan pertama tahun 1992

dan cetakan yang digunakan ke-15 tahun 2020

Indeks : hlm. 152

ISBN : 979-526-085-5

Kebutuhan terhadap buku bacaan dalam dunia pendidikan terutama buku Ilmu Pendidikan Islam semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Hal ini membuat penyusunan buku Ilmu Pendidikan Islam diproduksi dengan harapan bisa menjadi pedoman dan acuan baik itu bagi mahasiswa maupun dosen pada mata kuliah terkait dengan Ilmu Pendidikan Islam. Buku teks Ilmu Pendidikan Islam

tidak hanya ditulis oleh Zakiah Daradjat tetapi oleh beberapa dosen dari Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dengan latar lembaga pendidikan yang sama, yakni dalam rangka proyek yang diadakan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1984-1985. buku ini tidak hanya menjadi pengangan mahasiswa dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, tetapi juga memiliki peran pada dasar epistemology pendidikan Islam Zakiah Dradjat secara umum mulai dari pengetahuan tentang manusia dan pendidikan sampai pada kemungkinan dari lingkungan pendidikan Islam.